BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stakeholder*

Teori Stakeholder merupakan hipotesis yang dikembangkan pada tahun itu oleh karya Edward Freeman. Menurut Freeman, kemungkinan suatu bisnis berhasil meningkat sebanding dengan jumlah individu atau kelompok yang kepentingannya terlibat dalam usaha tersebut (Sukoco, 2014). Menurut Teori Pemangku Kepentingan, agar sebuah perusahaan berhasil dalam jangka panjang, diperlukan bantuan dari banyak pemangku kepentingan. Konsekuensinya, perspektif pemangku kepentingan harus dimasukkan ke dalam setiap fungsi yang dilakukan korporasi (Rokhlinasari, 2016). Menurut Cragg dan Greenbaum, Teori *Stakeholder* menjelaskan bahwa seorang manajer bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham (investor) perusahaan, tetapi juga kepada semua komponen lain yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan yang diambil perusahaan. Dengan kata lain, tanggung jawab manajer melampaui pemegang saham (Rahardja et al., 2011). Untuk alasan ini, sangat penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan mereka setiap dan semua informasi terkait aktivitas mereka.

Menurut (Rokhlinasari, 2016) ada beberapa alasan mengapa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu:

1. Isu lingkungan dapat mengganggu kualitas hidup berbagai pihak dalam masyarakat.
2. Ega globalisasi telah mendorong peningkatan produksi produk yang ramah dengan lingkungan.
3. Para investor cenderung memilih perusahaan yang memiliki kebijakan yang bukan hanya berfokus pada kinerja ekonomi melainkan juga kepada lingkungan sekitar dalam menanamkan modalnya.
4. Para lembaga pecinta lingkungan semakin vocal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang tidak peduli terhadap lingkungan.

Teori *Stakeholder* ini sejalan dengan perkembangan *Green Accounting* dan

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu ketika bisnis diharuskan mengungkapkan biaya terkait lingkungan dan tanggung jawab sosial mereka kepada pemangku kepentingan mereka. *Green Accounting* dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan evolusi teori pemangku kepentingan. Teori *Stakeholder* dikembangkan untuk membantu manajer bisnis dalam memaksimalkan nilai dari semua operasi yang dilakukan oleh perusahaan sekaligus mengurangi jumlah kerugian yang dilakukan untuk kepentingan pemangku kepentingan. (Rokhlinasari, 2016).

2.2 Kinerja Keuangan

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Agustin, keberhasilan keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu paling baik dicerminkan oleh ukuran-ukuran seperti kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen keuangannya, likuiditas perusahaan, dan profitabilitas perusahaan (Nurcahya et al., 2017). Metrik kinerja keuangan perusahaan digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri.

Dokumen yang dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berisi aturan akuntansi yang digunakan oleh IAI (Subiyanto & Amanah, 2022). Pengambil keputusan paling penting di dalam organisasi berkonsultasi dengan laporan kinerja keuangan sebelum memutuskan tindakan untuk masa depan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, investor dapat memilih untuk menjual atau membeli saham perusahaan atau tidak.

2.1.2 Tujuan Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan investor sangat penting bagi mereka. Ada kemungkinan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat membantu pemegang saham menentukan apakah mereka harus mempertahankan kepemilikan mereka saat ini di perusahaan atau mencari peluang investasi lainnya (Sanjaya & Rizky,

2018). Investor dapat mengukur kelayakan pengembalian investasi mereka di masa depan dalam suatu organisasi dengan memeriksa kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Jumingan, ada dua tujuan dari dibuatnya kinerja keuangan:

1. Kinerja keuangan digunakan untuk memahami kemampuan keuangan perusahaan, khususnya keadaan likuiditas, modal, dan profitabilitas yang telah ada baik pada tahun berjalan maupun pada tahun-tahun sebelumnya hingga tahun berjalan.
2. Kegunaan lain dari kerja keuangan adalah untuk menentukan seberapa baik suatu organisasi dapat menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang efektif. (Sanjaya & Rizky, 2018).

2.1.3 Rasio Keuangan

Menurut Stephen, keberhasilan finansial suatu bisnis dapat dievaluasi dengan menggunakan metrik yang disebut sebagai "Rasio Keuangan", yang kepentingannya ditetapkan dengan melakukan analisis terhadap data keuangan perusahaan (Maulana, 2019). Bergantian, Kasmir menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan adalah tindakan membandingkan statistik yang ditemukan dalam laporan keuangan dengan memberikan bobot pada setiap angka untuk membuat perbandingan di antara mereka. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan tentang hubungan antar data. Selain itu, perbandingan dapat dilakukan dengan membandingkan satu komponen dengan komponen lainnya yang terjadi dalam laporan keuangan selama satu periode atau selama beberapa periode waktu yang berbeda (Herawati, 2019). Penggunaan rasio keuangan mungkin berguna dalam menentukan tidak hanya bagaimana nasib perusahaan secara finansial di masa lalu tetapi juga di masa sekarang dan masa depan (Sofyan, 2019). Akibatnya, rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan keuangan yang dicapai oleh suatu perusahaan.

2.1.4 Rasio *Return on Assets (ROA)*

Pengembalian aset adalah salah satu dari banyak rasio keuangan yang dapat

digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio lain seperti laba atas ekuitas, juga dapat digunakan. Menurut Kasmir, *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang mewakili keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari penggunaan total asetnya. ROA dapat dihitung dengan membagi keuntungan perusahaan dengan seluruh asetnya (Aiman & Rahayu, 2019). *Return on Assets*, sering dikenal dengan ROA, adalah sejenis rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya (Sanjaya & Sipahutar, 2019).

Analisis Pengembalian Aset (ROA), yang menganalisis efisiensi operasional total perusahaan, adalah jenis perhitungan yang sering digunakan untuk tujuan ini. Dalam hal pemanfaatan sumber dayanya, bisnis yang memiliki Pengembalian Aset (ROA) yang lebih besar berada dalam posisi yang lebih kuat daripada pesaingnya karena menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari operasinya. (Aiman & Rahayu, 2019).

Menurut Riyanto, ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi dan rendahnya *Return on Assets* (ROA), yaitu:

1. Profit Margin, yaitu selisih antara *net sales* dengan *operating expenses*.
2. Tingkat Perputaran Aktiva Usaha, yaitu kecepatan perputaran *operating assets* dalam satu periode tertentu (Alpi & Gunawan, 2018).

Menurut Kasmir, *Return on Assetss* (ROA) dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Alpi & Gunawan, 2018):

$$Return\ On\ Assets = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

2.3 Green Accounting

2.3.1 Pengertian *Green Accounting*

Menurut Lako, *Green Accounting* adalah metode akuntansi yang mencakup pengungkapan informasi tentang pengaruh kegiatan perusahaan terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan dalam satu laporan yang komprehensif dan bermanfaat

bagi mereka yang menggunakannya dalam proses pengambilan keputusan, baik keputusan tersebut finansial atau lainnya (Firantia Dewi & Imam Muslim, 2022). Namun, menurut Cohen dan Robbins, *Green Accounting* adalah jenis akuntansi yang melaporkan tidak hanya biaya yang terkait dengan kegiatan ekonomi perusahaan, tetapi juga biaya dan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sebagai akibat langsung dari perencanaan bisnis dan keputusan. Dengan kata lain, *Green Accounting* merupakan metode akuntansi yang memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. (Maryanti & Hariyono, 2020).

2.3.2 Tujuan *Green Accounting*

Menurut (Lako, 2018), tujuan dari Akuntansi Hijau (*Green Accounting*) dan pelaporan informasi *Green Accounting* adalah untuk menyediakan data akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan yang komprehensif dalam satu set materi pelaporan keuangan sehingga para pemangku kepentingan dapat menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi dan membuat keputusan tentang investasi, ekonomi, dan manajemen.

2.3.3 Peraturan Mengenai *Green Accounting*

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan resmi yang berkaitan dengan *Green Accounting.* (Kusumaningtias, 2013) mengungkapkan ada 6 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Green Accounting*, yaitu:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-134/BI/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 mengenai Akuntansi Kehutanan dan No. 33 mengenai Akuntansi Pertambangan Umum.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penetapan Peringkat

Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum.

2.3.4 Fungsi dan Peran *Green Accounting*

Menurut Fasua, fungsi *Green Accounting* dibagi menjadi dua, yaitu (Kusumaningtias, 2013):

1. Fungsi internal

   Akses ke *Green Accounting* akan sangat bermanfaat bagi manajer bisnis dan departemen yang terkait dengan bisnis. *Green Accounting* dapat digunakan untuk mengelola dan menganalisis pengeluaran lingkungan, membandingkan biaya tersebut dengan manfaat yang diperoleh, dan menimbang manfaat relatif dari berbagai pendekatan perlindungan lingkungan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Menurut tujuan internalnya, *Green Accounting* dapat digunakan untuk mengelola dan menganalisis pengeluaran lingkungan.

2. Fungsi eksternal

   Di sisi lain, sesuai dengan fungsi eksternal *Green Accounting*, praktik tersebut dapat dimanfaatkan oleh bisnis untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemangku kepentingan mereka dengan membuat hasil inisiatif kelestarian lingkungan mereka tersedia untuk umum. Hal ini dilakukan sesuai dengan fungsi eksternal *Green Accounting*. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan membuat hasil *Green Accounting* tersedia untuk umum, perusahaan akan lebih mampu memenuhi kewajiban mereka kepada pemangku kepentingan, dan *Green Accounting* akan berfungsi sebagai dasar yang berharga untuk menilai langkah-langkah lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

2.3.5 Perlunya Perusahaan dalam Menerapkan Konsep *Green Accounting*

Menurut Fasua, ada beberapa alasan mengapa perusahaan perlu menerapkan *Green Accounting* dalam kegiatan operasionalnya, yaitu (Kusumaningtias, 2013):

1. Perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis untuk mengurangi atau menghilangkan biaya lingkungan seperti melakukan perubahan dalam kegiatan operasional untuk diinvestasikan dalam proses produksi yang ramah dengan lingkungan.
2. Biaya lingkungan dapat menjadi tidak jelas dan dimasukkan ke dalam akun *overhead* atau mungkin akan diabaikan apabila tidak mendapatkan perhatian yang khusus.
3. Pembayaran yang telah dibayarkan oleh perusahaan untuk menjaga lingkungan dapat dinaikkan dengan memungut pembayaran dari penjualan barang ramah lingkungan, yang tidak akan mempengaruhi keuntungan hukum yang diperoleh perusahaan.
4. Penggunaan kompensasi lingkungan yang efisien dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik, selain memberikan keuntungan bagi kesehatan manusia dan keberhasilan bisnis.
5. Jika seseorang dapat memperoleh pengetahuan tentang biaya lingkungan, mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk membantu perusahaan mencapai tujuan mereka dalam menciptakan item yang lebih ramah lingkungan di masa mendatang dengan membantu mereka dalam menetapkan biaya dan harga produk secara akurat.
6. Operasi perusahaan, produk, dan sumber daya mentah semua diambil dari lingkungan santai, yang memberikan keunggulan kompetitif atas pesaingnya yang lebih besar dari keuntungan lain yang mereka miliki. Korporasi akan memiliki akses ke mata uang yang menguntungkan di kalangan masyarakat umum untuk mencapai salah satu tujuannya, yaitu meningkatkan penjualan barang-barang yang dapat dipercaya.
7. Pengakuan atas biaya lingkungan dan pekerjaan berpotensi menghambat perluasan perusahaan dan pengoperasian sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen tersebut telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan

sebagai akibat langsung dari penyebaran standar ISO 14001 di seluruh dunia.

8. menurut Arisandi dan Frisko, akan memudahkan investor untuk mendapatkan informasi dari pengungkapan tersebut di atas dan juga akan memudahkan investor untuk menyusun argumentasi hukumnya. Hal ini akan memudahkan investor untuk mendapatkan informasi dari pengungkapan tersebut.

2.3.6 Pengukuran *Green Accounting*

Menurut (Lako, 2018), belum ada data yang solid untuk mengidentifikasi bagaimana menangani akuntansi lingkungan di perusahaan. Hal ini disebabkan fakta bahwa akuntansi lingkungan masih relatif baru. Ini melibatkan penentuan bagaimana menilai dan mengevaluasi lingkungan, serta mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan yang terlibat dalam melakukannya. Penghitungan lingkungan yang dilakukan dengan cara yang akurat dan menyeluruh akan memberikan efek menguntungkan pada cara fungsi lingkungan. PROPER adalah salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia untuk meningkatkan kinerja lingkungan usaha sesuai dengan standar akuntansi. Penulis penelitian ini memanfaatkan program PROPER untuk mengukur variabel *Green Accounting*. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Meiriani et al., 2022) dan (Damayanti & Astuti, 2022) yang mengevaluasi *Green Accounting* dengan menggunakan sistem PROPER. Di setiap level perusahaan, sistem PROPER menerapkan berbagai macam warna, dimulai dengan emas dan berlanjut ke biru, merah, dan hitam.

2.4 Corporate Social Responsibility

2.4.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Menurut Aini, "*Corporate Social Responsibility*" (juga dikenal sebagai "CSR") mengacu pada pelaksanaan inisiatif oleh korporasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang di komunitas sekitar serta lingkungan alam (Albastiah & Sisdianto, 2022). Gagasan "*Profit, Planet, and People*" yang dikemukakan oleh John Elkington berfungsi sebagai landasan "*Corporate Social*

Responsibility" (CSR). Sejak tahun 1979, gagasan tanggung jawab sosial perusahaan, sering dikenal sebagai CSR, telah dilihat sebagai seperangkat pedoman yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, prinsip hukum, penghargaan terhadap lingkungan, dan pengabdian pada bisnis (Firdausi et al., 2018). Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBSD) mendefinisikan "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" (CSR) sebagai "komitmen perusahaan untuk beroperasi secara sah dan etis dan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup semua karyawan dan masyarakat umum." CSR adalah singkatan dari "*Corporate Social Responsibility*." (Albastiah & Sisdianto, 2022).

2.4.2 Landasan Pelaksanaan CSR di Indonesia

Di Indonesia sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai *Corporate Social Reponsibility*. Peraturan-peraturan tersebut antara lain (Arumningtyas et al., 2017):

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

2.4.3 Manfaat *Corporate Social Responsibility*

CSR bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat tetapi juga

memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Manfaat CSR bagi masyarakat adalah sebagai berikut (Pratiwi et al., 2020):

1. meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat di sekitar kawasan niaga dan ekosistem alam.
2. Beasiswa pendidikan bagi anak-anak di lingkungan wilayah tersebut tidak mampu melakukan apa yang diperlukan untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia.
3. Praktek perawatan, atau pemeliharaan preventif, untuk bangunan publik semakin umum.
4. Setiap bangunan desa atau fasilitas masyarakat lainnya yang dianggap bersifat sosial dan bermanfaat bagi penduduk setempat, terutama yang bertempat tinggal dekat dengan perusahaan yang didirikan, dikecualikan dari persyaratan ini.

Selain itu, CSR juga memberikan banyak manfaat bagi perusahaan apabila diterapkan dengan baik, yaitu (Pratiwi et al., 2020):

1. Dengan menerapkan CSR, perusahaan dapat mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Perusahaan juga akan mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi adanya resiko bisnis perusahaan.
4. Semakin meluasnya akses sumber daya bagi aktivitas operasional perusahaan.
5. Mereduksi biaya contohnya yang berkaitan dengan dampak pembuangan limbah.
6. Perusahaan dapat memperbaiki hubungan dengan para *stakeholder*.

2.4.4 Indikator Kinerja pada Pengungkapan CSR GRI Standard 2021.

GRI (*Global Reporting Initiative*) merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang krisis global Menurut Standar GRI (*Global Reporting Initiative*) Versi 2021, ada tiga area fokus utama pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR): indikator kinerja ekonomi terdiri dari 17 item, indikator kinerja lingkungan terdiri dari 37 item, dan indikator kinerja sosial terdiri dari 39 item dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 1.
Indikator Kinerja Pengungkapan CSR GRI versi Standard 2021

Indikator Kinerja Ekonomi	
• **Aspek Kinerja Ekonomi**	
EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim.
EC3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya.
EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah.
• **Aspek Kehadiran Pasar**	
EC5	Di lokasi operasional yang signifikan, harga sewa yang lebih tinggi dikaitkan dengan ketinggian standar yang lebih tinggi relatif terhadap minimum lokal. Perbandingan kesenjangan upah gender karyawan pemula dengan upah minimum regional di lokasi operasional yang signifikan.
EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan.
• **Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung**	
EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan.
EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan.
• **Aspek Praktik Pengadaan**	
EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan.
• **Aspek Anti Korupsi**	
EC10	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan Korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
EC11	Komunikasi dan peiatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
EC12	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
• **Aspek Anti Persaingan**	
EC13	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik Monopoli dan hasilnya
• **Aspek Pajak**	
EC14	Pendekatan terhadap pajak
EC15	Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak
EC16	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak
EC17	Iaporan per negara
Indikator Kinerja Lingkungan	
• **Aspek Material**	
EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume.
EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang.
• **Aspek Energi**	

EN3	Konsumsi energi dalam organisasi.
EN4	Konsumsi energi di luar organisasi.
EN5	Intensitas energi.
EN6	Pengurangan konsumsi energi.
EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa.
• **Aspek Air**	
EN8	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
EN9	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
EN10	Pengambilan air
EN11	Pembuangan air
EN12	Konsumsi air
EN13	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
• **Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)**	
EN14	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman Hayati tinggi di luar kawasan lindung.
EN15	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN16	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
EN17	Jumiah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
• **Aspek Emisi**	
EN18	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
EN19	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2)
EN20	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
EN21	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
EN22	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
EN23	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
EN24	Nox, Sox, dan emisi udara signifikan iainnya
• **Aspek Efluen dan Limbah**	
EN25	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
EN26	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
EN27	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
EN28	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel2 lampiran I, II, III, Dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
EN29	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan Limpasan dari Organisasi
EN30	Timbulan limbah dan dampak-dampak yang signifikan terkait limbah

EN31	Pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah
EN32	Timbulan limbah
EN33	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
EN34	Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir
• **Aspek Kepatuhan Lingkungan**	
EN35	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
• **Aspek Penilaian Lingkungan Pemasok**	
EN36	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
EN37	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
<u>Kinerja Sosial</u>	
Aspek Kinerja penting yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk.	
Aspek Sosial	
• **Aspek Kepegawaian**	
IA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
IA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
IA3	Cuti melahirkan
• **Aspek Hubungan Manajemen**	
IA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
• **Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja**	
IA5	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
IA6	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
IA7	Layanan kesehatan kerja
IA8	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja
IA9	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
IA10	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
IA11	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
IA12	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
IA13	Kecelakaan kerja
IA14	Penyakit akibat kerja
• **Aspek Pelatihan dan Pendidikan**	
IA15	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut

	kategori karyawan
IA16	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
IA17	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
• **Aspek Keberagaman Dan Kesetaraan Peluang**	
IA18	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
IA19	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
Aspek Hak Asasi Manusia	
• **Aspek Nondiskriminasi**	
HR1	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
• **Aspek Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif**	
HR2	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
• **Aspek Pekerja Anak**	
HR3	Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak
• **Aspek Kerja Paksa dan Kerja Wajib**	
HR4	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib
• **Aspek Praktek/Tindakan Pengamanan**	
HR5	Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi
• **Aspek Hak Penduduk Asli**	
HR6	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli
• **Aspek Penilaian Hak Asasi Manusia**	
HR7	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
HR8	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
HR9	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
• **Aspek Masyarakat Iokal**	
HR10	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokai, penilaian dampak, dan program pengembangan
HR11	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
• **Aspek Penilaian Sosial Pemasok**	
HR12	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
HR13	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
• **Aspek Kebijakan Publik**	

HR14	Nilai totai kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Kategori Tanggung Jawab Atas Produk	
• **Aspek Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan**	
PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
• **Aspek Pelabelan Produk dan Jasa**	
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa
PR5	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi dan/atau peraturan sukarela yang menyangkut komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan pensponsoran
• **Aspek Privasi Pelanggan**	
PR6	Jumiah total pengaduan yang berdasar yang diterima mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan

Sumber : Giobai Reporting Initiative (GRI) Index versi Standard 2021

2.4.5 Pengukuran Indikator Kinerja pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility GRI versi Standard* 2021.

Pengukuran kinerja pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah menggunakan pengukuran Indikator Kinerja pada Pengungkapan CSR GRI versi Standard 2021. Berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) adapun jumlah indikator kinerja yakni 93 item indikator dari 3 kategori. Rumus perhitungan CSR GRI versi Standard 2021 adaiah:

$$CSRDi = \frac{\text{Jumiah Item Indikator Kinerja yang Diungkapkan}}{Seluruh\ Item\ Indikator\ Kinerja\ CSRDi\ GRI\ versi\ Standard\ 2021.}$$

Keterangan:

CSRDi: Indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure* perusahaan.

2.5 *Leverage*

Leverage menurut Maryam (2014) diartikan sebagai penggunaan sejumlah aset atau dana oleh perusahaan yang mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah biaya tetap dalam penggunaannya. Sehingga dapat disimpulkan *Leverage* merupakan ukuran seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan hutang. *Leverage* dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan apabila dikelola dengan baik. Namun *Leverage* juga dapat memberikan resiko kerugian sesuai dengan persentase laba yang diharapkan apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan (Gunawan et al., 2019).

Leverage menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi profitabilitas dikarenakan *Leverage* dapat meningkatkan modal perusahaan dengan tujuan meningkatkan keuntungan. *Leverage* timbul karena perusahaan menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap, yang berupa biaya penyusutan dari aktiva tetap, dan biaya bunga dari hutang dalam aktivitas operasionalnya. Perusahaan yang menggunakan *Leverage* mempunyai tujuan supaya keuntungan yang akan didapatkan itu lebih besar dari biaya tetap (beban tetap).

Menurut Kasmir (2015) rasio *Leverage* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Rasio *Leverage* menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang (hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan modal sendiri. Hal ini biasanya digunakan untuk mengukur *Financial Leverage* dari suatu perusahaan. Dalam mengukur *Leverage* dapat menggunakan banyak rasio seperti *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Assets Ratio* (DAR). Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur rasio *Leverage* adalah *Debt to Assets Rasio* (DAR).

Debt to Assets Ratio (*Debt Ratio*) menurut Kasmir (2016) adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Selain itu *Debt to Assets Ratio* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang perusahaan tersebut.

Suatu perusahaan dikatakan solvabel apabila perusahaan tersebut memiliki aktiva dan kekayaan yang cukup untuk membayar seluruh hutangnya. Rasio ini menunjukkan besarnya total hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio hutang juga merupakan komposisi dana yang diberikan oleh kreditor kepada perusahaan. Pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi rasio hutang bisa berarti buruk, hal ini menyebabkan perusahaan yang memiliki rasio hutang tinggi dapat mengalami masalah keuangan. Namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah maka dapat meningkatkan keuntungan.

Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan resiko pada kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan membayar semua kewajibannya. Semakin tinggi nilai DAR berarti semakin besar sumber dana melalui pinjaman untuk membiayai aktiva. Nilai DAR yang tinggi menunjukkan risiko yang tinggi pula karena ada kekhawatiran perusahaan tidak mampu menutupi hutang-hutangnya dengan aktiva yang dimiliki, yang menyebabkan perusahaan kesulitan memperoleh tambahan pinjaman.

2.6 Penelitian Terdahuiu

Tabel 2. 2.
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Maryanti & Hariyono, 2020)	Pengaruh Implementasi *Green Accounting* Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel dependen:kinerja perusahaan (ROA) Variabel independen: Implementasi *Green Accounting*	Penerapan *Green Accounting* tidak berpengaruh terhadap *return on assets* (ROA).
2.	(Damayanti & Astuti, 2022)	Pengaruh *Green Accounting* Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Dan Industri Kimia Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2020)	Variabel dependen:kinerja perusahaan (ROA) Variabel independen: Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Lingkungan	1. Variabel Kinerja Lingkungan (KL) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. 2. Variabel Pengungkapan Lingkungan (PL) berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.
3	(Albastiah & Sisdianto, 2022)	Penerapan *Green Accounting*, Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syari'ah Di Indonesia Tahun 2018-2020	Variabel dependen: kinerja keuangan (*financial performance*) Variabel independen: *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility*	Penerapan *Green Accounting*, dan *Corporate Social Responsibility* mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap *financial performance* bank umum syariah di Indonesia tahun 2018-2020.

4	(Wulandari, 2020)	Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) *Disclosure* Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Perkebunan Di Bursa Efek Indonesia)	Variabel dependen: profitabilitas perusahaan (ROA) Variabel independen: CSR *Disclosure*	CSR *Disclosure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel ROA.
5	(Firantia Dewi & Imam Muslim, 2022)	Pengaruh Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dan *Green Accounting* Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Perusahaan Variabel independen: *Corporate Social Responsibility* dan *Green Accounting*	*Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan *Green Accounting* yang diukur dengan biaya Lingkungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
6	(Rode & Dewi, 2019)	Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel dependen: Kinerja keuangan Variabel independen: *Leverage*, Kepemilikan Manajeriai, Dewan Direksi	Kepemilikan Manajerial dan Dewan Direksi berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Keuangan sedangkan *Leverage* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

7	(Nurmalia & Ardana, 2020)	Analisis Pelaporan Zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah dan *Leverage* Mengungkapkan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel dependen: kinerja keuangan Variabel independen: Zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility*, Dewan Pengawas Syariah, *Leverage*.	Variabel pelaporan zakat dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja BUS, sedangkan Variabel ICSR dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BUS.
8	(N. Utami, 2018)	Pengaruh Risiko Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Kinerja Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015	Variabel dependen: kinerja keuangan perbankan Variabel independen: Dana pihak ketiga, Jumlah kas, Kesenjangan likuiditas, *Leverage*	Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap ROA bank. Jumlah kas tidak berpengaruh terhadap ROA bank. Kesenjangan likuiditas dan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap ROA bank.
9	(Lutfiana & Hermanto, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan	Variabel dependen: kinerja keuangan Variabel independen: *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas	Variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

10	(Ramadani & Muslih, 2020)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage* dan Manajemen Iaba terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Variabel dependen: kinerja keuangan Variabel independen: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage* dan Manajemen Iaba	Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage* dan Manajemen Laba berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Variabel dependen yaitu kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018. Secara parsial, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, *Leverage* tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Tidak ada yang mengatakan "sukses" dalam dunia bisnis seperti memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan kerugian. Kali ini, para akademisi ingin mencoba mempelajari aktivitas perusahaan *Food and Beverages* yang berfokus pada keuntungan sekaligus menjaga lingkungan, dengan menggunakan konsep

Green Accounting dalam pelaporan keuangannya, atau lebih umum *Green Accounting* dengan menggunakan aset mereka secara efisien. Dalam analisis ini, kami fokus pada tiga variabel kunci: *Green Accounting*, tanggung jawab sosial perusahaan, dan *Leverage*.

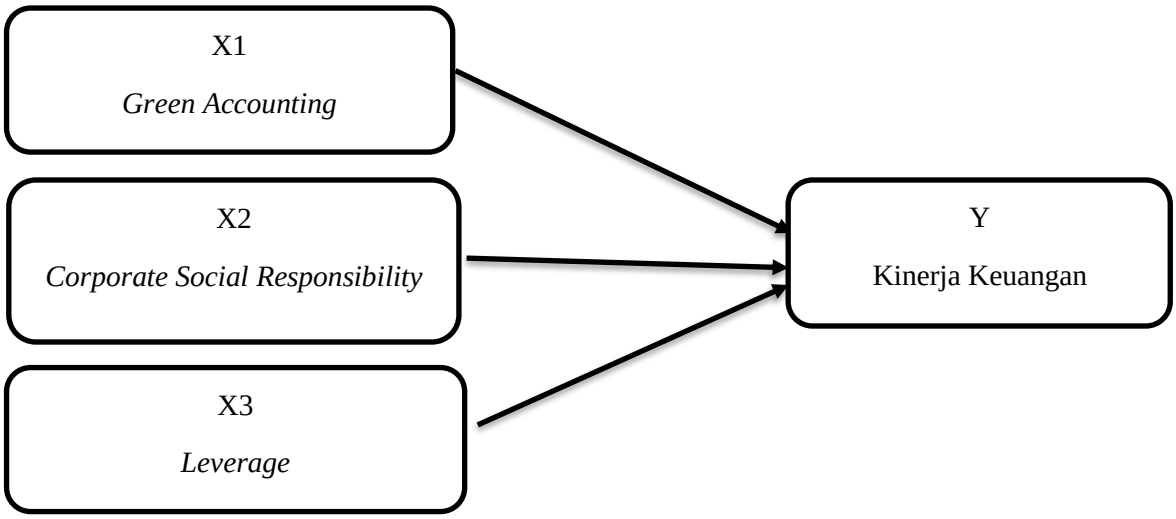

Gambar 2. 1.
Kerangka Pemikiran

2.8 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan rangkuman fakta tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan hipotesis pengaruh *Green Accounting*, *Corporate Social Responsibility*, dan *Leverage* terhadap kinerja keuangan bisnis *Food and* Beverages di Indonesia selama tahun 2019 – 2021. Teori *Stakeholder* berfungsi sebagai prinsip pengorganisasian untuk penelitian ini. Menurut Teori Pemangku Kepentingan, operasi bisnis organisasi akan membaik jika hubungan yang mengikatnya dengan banyak pemangku kepentingan kuat, sedangkan sebaliknya akan berlaku bila ikatan semacam itu tidak mencukupi.

2.8.1 *Green Accounting* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan *Food and Beverages*

Menurut (Zulhaimi, 2015), *Green Accounting* dapat diartikan sebagai penerapan akuntansi yang mengharuskan perusahaan untuk memasukkan biaya-biaya terkait pelestarian lingkungan sekitar di dalam laporan keuangan selain biaya-biaya ekonomis. Penerapan *Green Accounting* dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang bagi perusahaan dikarenakan dengan menerapkan *Green Accounting* maka perusahaan dapat mengantisipasi pengeluaran yang lebih besar akibat dari adanya masalah lingkungan dan tuntutan dari masyarakat (Firantia Dewi & Imam Muslim, 2022). Dengan menerapkan *Green Accounting* maka perusahaan akan dinilai baik oleh para *stakeholder* dikarenakan perusahaan tidak hanya berfokus dalam menghasilkan keuntungan ekonomis namun juga peduli dengan lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, konsumen akan memiliki minat yang lebih besar untuk membeli dari perusahaan sehingga memberikan keunggulan pemasaran dibandingkan pesaing yang tidak menggunakan *Green Accounting* (Astuti, 2012). Sebagai akibat langsung dari hal ini, penjualan produk akan naik, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan akan membaik. Penelitian dari sejumlah sumber yang berbeda menunjukkan bahwa *Green Accounting* memiliki efek menguntungkan pada kinerja keuangan suatu organisasi. Studi seperti yang dilakukan oleh (Albastiah & Sisdianto, 2022) menunjukkan bahwa *Green Accounting* memiliki pengaruh besar terhadap kinerja keuangan suatu organisasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Meiriani et al., 2022) menunjukkan bahwa tingkat transparansi akuntansi lingkungan yang tinggi menghasilkan peningkatan belanja modal, yang akan meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Hadriyani & Dewi, 2022) mengungkapkan bahwa *Green Accounting* berdampak pada kesuksesan finansial perusahaan. Oleh karena itu, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengungkap bukti bahwa *Green Accounting* berdampak pada kinerja keuangan bisnis makanan dan minuman secara keseluruhan.

H_1 = *Green Accounting* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan *Food and Beverages.*

2.8.2 *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan *Food and Beverages*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu program tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan guna memperbaiki kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial yang merupakan dampak dari kegiatan operasional perusahaan (Firdausi et al., 2018). Bentuk pertanggungjawaban ini bukan hanya berfokus kepada satu aspek saja melainkan berfokus pada 3 aspek yaitu ekonomi, sosial dan juga lingkungan. Di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur terkait CSR sehingga seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan melaksanakan CSR. Selain menjadi hal yang wajib dilakukan, CSR juga memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kegiatan CSR, sebagaimana dinyatakan oleh (Firantia Dewi & Imam Muslim, 2022), berkontribusi pada peningkatan reputasi perusahaan dan loyalitas konsumen yang lebih besar. Peningkatan loyalitas merek menghasilkan lebih banyak penjualan, yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, dengan mengadopsi CSR, lebih banyak investor akan siap untuk memasukkan uang mereka ke perusahaan, yang memungkinkan operasinya berfungsi lebih lancar (Firdausi et al., 2018). Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh (Albastiah & Sisdianto, 2022), pelaporan CSR memang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Firdausi et al., 2018) menunjukkan bahwa meskipun pengungkapan CSR memang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, namun dampaknya tidak terlalu signifikan. Hasil penelitian sebelumnya telah dikonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2020), yang menunjukkan bahwa pelaporan CSR memang berpengaruh terhadap kesuksesan finansial suatu perusahaan. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini juga akan memberikan bukti bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap kesuksesan finansial bisnis makanan dan minuman.

H_2 = *Corporate Social Reponsibility* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan *Food and Beverages*.

2.8.3 *Leverage terhadap* Kinerja Keuangan pada Perusahaan *Food and Beverages*

Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan memerlukan dana yang cukup banyak. Pendanaan ini dapat diperoleh dari mana saja baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, salah satunya dengan berhutang. Saat mencoba menentukan jumlah total hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, penting untuk melakukan perhitungan yang dikenal dengan Rasio *Leverage*. Istilah "daya ungkit" mengacu pada kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmennya, sebagaimana ditentukan oleh (Meiriani et al., 2022). Jumlah aset perusahaan yang dapat digunakan untuk melunasi utangnya diukur dengan menggunakan *Leverage*, yaitu alat yang digunakan oleh korporasi (Ade Irma, 2019). *Leverage* yang tinggi berarti perusahaan memiliki tingkat hutang yang signifikan, dan sebagai akibatnya, kinerja keuangan perusahaan juga akan menderita akibat besarnya bunga yang harus dibayar untuk membayar pinjaman (Aiman & Rahayu, 2019). Temuan ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Rode & Dewi, 2019), yang sampai pada kesimpulan bahwa rasio *Leverage* berdampak pada kinerja keuangan. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh (Aiman & Rahayu, 2019), *Leverage* juga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Temuan penelitian yang dilakukan oleh (Meiriani et al., 2022) sejalan dengan temuan penelitian tersebut di atas; khususnya, mereka mengungkapkan bahwa *Leverage* memang memiliki beberapa dampak pada kinerja keuangan suatu organisasi, meskipun kecil. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa pengaruh *Leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan paling sukses di sektor makanan dan minuman akan ditemukan selama penelitian ini. *Leverage* juga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan.

H_3 = *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan *Food and Beverages*